

**TRANSFORMASI KEBIJAKAN EKONOMI POLITIK BRAZIL
DI BAWAH PEMERINTAHAN JAIR MESSIAS BOLSONARO
TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN AMAZON
BAGI INVESTOR ASING DI BRAZIL**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana pada
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin*

Oleh:

ZULMI ZULIANSYAH

E 131 14 514

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : TRANSFORMASI KEBIJAKAN EKONOMI POLITIK BRAZIL
DI BAWAH PEMERINTAHAN JAIR MESSIAS BOLSONARO
TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN AMAZON BAGI
INVESTOR ASING DI BRAZIL

N A M A : ZULMI ZULIANSYAH

N I M : E13114514

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



Makassar, 2 Februari 2021

Mengetahui :

Pembimbing I,

H. Darwis, MA, Ph.D
NIP. 196201021990021003

Pembimbing II

Aswin Baharuddin, S.IP, MA
NIP. 198607032014041002

Mengesahkan :
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : TRANSFORMASI KEBIJAKAN EKONOMI POLITIK BRAZIL
DI BAWAH PEMERINTAHAN JAIR MESSIAS BOLSONARO
TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN AMAZON BAGI
INVESTOR ASING DI BRAZIL

N A M A : ZULMI ZULIANSYAH

N I M : E13114514

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 11 Desember 2020.

TIM EVALUASI

Ketua : H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Abdul Razaq. Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

Anggota : 1. Drs. Aspiannor Masrie, M.Si

2. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

3. Bama Andika Putra, S.IP, MIR

Surat Pernyataan Keaslian

Dengan ini, saya Zulmi Zuliansyah selaku pemilik dan pembuat skripsi dengan judul **Transformasi Kebijakan Ekonomi Politik Di Bawah Pemerintahan Jair Messias Bolsonaro Terhadap Pengelolaan Hutan Amazon Bagi Investor Asing di Brazil** menyatakan **Keaslian Kepemilikan Skripsi** ini.

Makassar, 4 Februari 2021,

Bertanda Tangan Dibawah Ini



METERAI
TEMPEL
TGL. 20
28A2AHF837912009
6000
ENAM RIBU RUPIAH
ZULMI ZULIANSYAH

NIM; E131 145 14

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Segala puji bagi Allah Subhanallahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, berkah, dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat yang harus diperoleh guna menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengalami berbagai halangan dan rintangan, tetapi dengan motivasi yang tinggi dan usaha serta doa dan semangat dari seluruh pihak yang mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini pada akhirnya penulis mampu menyelesaikannya dengan maksimal.

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua penulis **Sumardi Rauf** dan **Nurmin**. Terima kasih dan salam kepada keduanya yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tiada habisnya sampai penulis bisa berada pada titik pencapaian ini. Tidak lupa juga kepada almarhumah **Nirwaeni Syam** yang telah memberikan perhatian yang tulus kepada penulis sehingga penulis bisa seperti sekarang ini. Doa dan Shalawat kepada Beliau agar senantiasa tenang di sisi-NYA.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan sebesar-besarnya kepada Bapak **H. Darwis M.A, Ph.D** selaku Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional sekaligus Pembimbing I penulis, serta **Kak Aswin Baharuddin, S.IP, M.A** selaku Sekretaris Departemen Ilmu Hubungan Internasional sekaligus pembimbing II penulis. Terima kasih atas bantuan baik itu kritik maupun saran

serta motivasi yang membangun selama proses bimbingan sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Teruntuk Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Hubungan Internasional, **Pak Patrice, Pak Burhanuddin, Pak Ishaq, Pak Aspiannor, Pak Munjin, Pak Husein Abdullah, Pak Nasir, Ibu Seni, Ibu Puspa, Kak Agus, Kak Gego, Kak Bama, Kak Aca, Ka Isda, dan Kak Jannah**, terima kasih sebesar-besarnya atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis baik itu dalam proses belajar mengajar maupun di luar dari itu. Salam hormat dan mohon maaf jika selama ini penulis memiliki salah baik langsung ataupun tidak langsung. Semoga hal-hal baik selalu menaungi bapak ibu sekalian. **Kepada Para Staff di Departemen Ilmu Hubungan Internasional**, baik yang saat ini masih berada di Departemen maupun telah meninggalkan Departemen, ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada mereka semua yang telah membantu pengurusan administrasi penulis dari awal masuk sampai penulis selesai menimba ilmu di kampus. Semoga rasa kekeluargaan diantara kita semua tetap terjalin dengan baik, Amin.

Selama berkuliah di Ilmu Hubungan Internasional, Penulis sangat bersyukur bisa bertemu dengan teman-teman sejawat yang menemani penulis dalam merajut mimpi di kampus Universitas Hasanuddin. Kawan-kawan yang selama di kampus menemani penulis dalam berkembang dan berproses, oleh karena itu kurang rasanya jika penulis tidak menuliskan rasa termia kasih kepada mereka.

1. **Kepada Angkatan 2014 "AGRESI" Ilmu Hubungan Internasional**, salam hormat dan sayang penulis kepada kalian. Sebuah kehormatan bagi penulis

dapat menjadi Ketua Angkatan kalian. Sehat selalu dan semoga kekeluargaan kita dapat terus terjalin.

2. **Kepada HIMAHI FISIP UNHAS**, rumah kedua bagi penulis, baik secara harfiah maupun literally. Ruang kecil yang memberikan penulis begitu banyak ilmu dan pengalaman. Tempat penulis mendapatkan begitu banyak saudara tak se-Ibu yang keren-keren. Doa penulis untuk rumah kecil HIMAHI, semoga tetap bertahan di tengah lesunya semangat berorganisasi mahasiswa hari ini. Maafkan penulis harus meninggalkan "RUMAH" disaat sedang tidak baik-baik saja.
3. **Kepada Pengurus HIMAHI periode 2016-2017**. Sebuah kehormatan bisa menjadi Ketua dan Nahkoda dari orang-orang luar biasa seperti kalian. Dari awal sejak terbentuknya kepengurusan ini, penulis senantiasa menekankan bahwa pada akhirnya, tujuan kita menjadi pengurus harian bersama adalah agar jika kita telah hidup dalam dunia dan kesibukan masing-masing nanti, jalinan kekeluargaan dan pertemanan kita tetap terjalin. Salam hormat penulis kepada kalian semua.
4. **Keluarga Besar KEMA FISIP UNHAS**, terima kasih telah menerima penulis sebagai bagian dari keluarga ini. Semoga hal-hal baik senantiasa menemani perjalanan keluarga besar ini. Aminn
5. **Kepada teman-teman KKN Kecamatan Lau dan Desa Soreang** khususnya, salam cinta penulis. Terima kasih atas pengalamannya di kampung orang. Semoga kita bisa bertemu lagi, kelak.

6. Kepada kakak-kakak Alumni dan Adik-Adik Mahasiswa Ilmu Hubungan

Internasional yang telah mengajarkan penulis dalam banyak hal, menemani penulis dalam berproses selama di kampus, dan menjadi kawan-kawan penulis dalam bertahun-tahun kehidupan penulis di dalam dunia kampus. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan yang telah penulis lakukan selama ini. Panjang umur semangat baik!

ABSTRAK

Zulmi Zuliansyah, (E13114514), "Transformasi Kebijakan Ekonomi Politik Brazil Di Bawah Pemerintahan Jair Messias Bolsonaro Terhadap Pengelolaan Hutan Amazon Bagi Investor Asing di Brazil", dibawah bimbingan H. Darwis, MA, Ph.D selaku pembimbing I dan Aswin Baharuddin, S.IP, MA selaku pembimbing II, pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universtas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transformasi kebijakan ekonomi politik Brazil dalam kasus hutan Amazon serta untuk mengetahui dampak dari transformasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif-analitik, dengan teknik pengumpulan data berupa telaah pustaka yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan berita yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun konsep yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini menggunakan konsep *Accumulation by dispossession* David Harvey dan Variabel idiosinkratik dalam pengambilan keputusan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan kebijakan ekonomi politik terhadap pengelolaan hutan Amazon dibawah pemerintahan Bolsonaro baik dari segi penanganan deforestasi, pemenuhan hak masyarakat adat Brazil, dan dalam kebijakan industrialisasi wilayah hutan Amazon. Perubahan kebijakan ekonomi politik Brazil tersebut diperuntukkan untuk membuka dan mempermudah akses investasi dan industri terhadap potensi hutan Amazon. Perubahan tersebut turut berdampak pada hutan Amazon, masyarakat adat yang hidup di dalamnya, serta terhadap citra Brazil dalam hubungan internasional.

Kata Kunci : Brazil, Jair Bolsonaro, Kebijakan Ekonomi Politik, Hutan Amazon

ABSTRACT

Zulmi Zuliansyah, (E13114514), "The Transformation of Brazil's Political Economy Policy Under the Government of Jair Messias Bolsonaro on Management of the Amazon Forest for Foreign Investor in Brazil", under the guidance of H. Darwis, MA, Ph.D as first supervisor dan Aswin Baharuddin, S.IP, MA as second supervisor, at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Hasanuddin University.

This Research aim to determine the transformation of Brazil Political Economy Policy in the case of the amazon forest under the government of jair messias bolsonaro and to determine the impact of the transformation. The research method used in the preparation of this thesis is descriptive analytic method, with data collection techniques in the form of literature review sourced from various literatures such as books, journals, articles, and news related to this search. The concept used in analyzing this research uses the concept of Accumulation by dispossession by David Harvey and Idiosyncratic variables in decision making

The results of this study indicate that there have been changes in political economy policies towards the management of the Amazon forest under the Bolsonaro government both in terms of handling deforestation, fulfilling the rights of Brazilian indigenous people, and in the industrialization policy of the Amazon forest area. The changes in Brazil's political economy policies is intended to open and facilitate investment and industrial access to the potential of the Amazon forest. These changes have had an impact on the Amazon forest, the indigenous people who live in it, and on the image of Brazil in international relations.

Keywords : Brazil, Jair Bolsonaro, political economy policy, Amazon forest

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PENGESAHAN TIM EVALUASI	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Metode Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. <i>Accumulation by Dispossession</i> by David Harvey	20
B. Variabel Idiosinkratik dalam Pengambilan Keputusan	26
BAB III GAMBARAN UMUM	
A. Dinamika Politik Brazil dari Era <i>Pink Tide</i> hingga Terpilihnya Bolsonaro	35
B. Profil Jair Messias Bolsonaro dan Kemenangannya Dalam PEMILU	43
C. Nilai Strategis Hutan Amazon Bagi Brazil	47
D. Kepentingan Asing Dalam Hutan Amazon	63

BAB IV	TRANSFORMASI KEBIJAKAN EKONOMI POLITIK BRAZIL DI BAWAH PEMERINTAHAN JAIR BOLSONARO TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN AMAZON BAGI INVESTOR ASING DI BRAZIL	
A.	Bentuk Transformasi Kebijakan Ekonomi Politik Brazil di Bawah Pemerintahan Bolsonaro Terhadap Pengelolaan Hutan Amazon Bagi Investor Asing di Brazil	69
1.	Kebijakan Bolsonaro Terhadap Perlindungan Hutan Amazon	70
2.	Kebijakan Bolsonaro Terhadap <i>Indigenous People</i> Hutan Amazon	77
3.	Kebijakan Bolsonaro Terhadap Pembangunan dan Industri di Wilayah Hutan Amazon	85
B.	Implikasi Transformasi Kebijakan Ekonomi Politik Brazil di Bawah Pemerintahan Bolsonaro Terhadap Pengelolaan Hutan Amazon Bagi Investor Asing di Brazil	89
1.	Dampak Terhadap Investor Asing	90
2.	Dampak Terhadap Lingkungan	92
3.	Dampak Terhadap <i>Indigenous People</i>	98
4.	Dampak Terhadap Citra Brazil Dalam Hubungan Internasional	100
BAB	V PENUTUP	
A.	Kesimpulan	103
B.	Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Faktor Individu Dalam Politik Luar Negeri	33
Tabel 2.1	Komposisi Wilayah <i>Amazonia Legal</i>	49
Tabel 2.2	Pesebaran Hutan Dari Masing-Masing Negara <i>Amazonia Legal</i>	50
Tabel 2.3	Pertumbuhan Sektor Agrikultur di Brazil	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Wilayah <i>Amazonia Legal</i>	49
Gambar 2.1	Salah satu bagian Yang Terdapat Dalam Dokumen <i>Baron of Rio Branco Project</i>	87
Gambar 2.2	Gambar Titik-Titik Api di Wilayah Hutan Amazon	94

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Level Deforestasi Di Brazil dari tahun 1988-2019	93
Grafik 1.2	Daftar Pasien Rawat Inap Kontaminasi Polusi Udara Akibat Kebakaran Hutan di Wilayah Hutan Amazon	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang dingin yang melibatkan dua kutub kekuatan besar dunia yakni, Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi ajang perlombaan persenjataan dan penyebaran kekuasaan dan ideologi yang diusung kedua negara adidaya tersebut ke seluruh penjuru dunia. Perlombaan penyebarluasan kekuasaan tersebut melintasi seluruh wilayah di dunia termasuk wilayah Amerika Latin yang merupakan kawasan terdekat dengan negara Amerika Serikat. Sebagai kawasan terdekat dengan Amerika Serikat, wilayah Amerika Latin tidak luput dari agenda keamanan nasional Amerika Serikat terutama dalam upaya membendung masuknya ideologi komunisme.

Dalam konfrontasinya dengan Uni Soviet pada masa perang dingin, Amerika Serikat berpandangan bahwa hal terpenting yang harus dilakukan adalah menyebarkan ideologi yang mereka usung dan menghalau berkembangnya ideologi komunisme ke seluruh dunia (Anggara, 2007). Demi tercapainya tujuan tersebut, mereka tidak ragu untuk mendukung secara politik dan militer tokoh dan pemerintahan diktator sayap kanan di negara-negara Amerika Latin, seperti Augusto Pinochet di Chile dan Jorge Rafael Videla di Argentina yang secara tegas bersikap anti terhadap negara dan pandangan politik komunisme. Dukungan yang diberikan Amerika Serikat tersebut turut membantu melanggengkan rezim diktator di negara-negara Amerika Latin

sekaligus menghalau masuknya ideologi komunisme ke negara Amerika Serikat melalui Amerika Latin.

Berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin, penyatuan kembali (reunifikasi) Jerman Barat-Timur (1990), serta beberapa konflik dan perang yang terjadi setelahnya, bukan berarti menjadikan posisi rezim militer Amerika Latin tidak tergoyahkan. Malah kondisi ketidakmerataan, kemiskinan, konsentrasi kekuasaan, keadilan disparitas sosial yang semakin akut di bawah rezim pemerintahan sayap kanan wilayah Amerika Latin melahirkan perlawanan yang keras dari masyarakat akar rumput. Hal ini berkaitan dengan pilihan kebijakan ekonomi politik negara-negara Amerika Latin yang ternyata justru melahirkan berbagai persoalan dan krisis yang semakin memperparah kondisi wilayah tersebut (Subono, 2017).

Krisis tersebut menyebabkan tingkat pengangguran meningkat tajam di negara-negara kawasan Amerika Latin. Selain itu, tingkat kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin di kawasan Amerika Latin menjadi yang terburuk di dunia. Pada tahun 1970, misalnya, 1 persen penduduk kaya menerima pendapatan 363 kali dibanding 1 persen penduduk miskin (Reygada, 2006). Pada tahun yang sama, jumlah orang miskin mencapai 118 juta dan meningkat tajam pada tahun 1994 menembus angka 210 juta. Negara Paraguay, Brazil, Bolivia dan Panama mencatat rekor sebagai negara dengan tingkat kesenjangan penduduknya menempati posisi teratas di planet ini. Segregasi masyarakat yang disebabkan oleh penerapan kebijakan neoliberal, juga melanda sektor politik. Di kawasan Amerika Latin khususnya Brazil, walau tidak resmi berlaku politik rasis *a la*

Afrika Selatan, selama berpuluh tahun, dominasi warga keturunan kulit putih tak tergoyahkan. Pada saat bersamaan, penduduk keturunan kulit hitam, perempuan, dan masyarakat adat menempati posisi yang sangat marjinal (Harnecker, 2015).

Krisis yang membawa keterpurukan bagi rakyat Amerika Latin ini menjadi api yang menggerakkan masyarakat untuk menuntut sebuah perubahan. Hal ini didukung oleh lahirnya pemimpin-pemimpin baru di Amerika Latin yang memiliki sikap anti hegemoni Amerika Serikat dan kebijakan ekonomi politik yang diusungnya. Hal tersebut kemudian menjadi pelopor dari lahirnya gelombang pemerintahan kiri di Amerika Latin yang dikenal dengan istilah *pink tide*. Gelombang ini dimulai pada tahun 1998 ketika Hugo Chaves terpilih menjadi Presiden Venezuela dan menetapkan kebijakan *leftist-populist a la* dirinya (Hatala, 2018), hingga pada tahun 2009, lebih dari 10 negara Amerika Latin dikepalai oleh pemimpin dari kelompok sayap kiri. Diantaranya, Chile dibawah Ricardo Lagos (1999) yang diteruskan oleh suksesornya yaitu Michael Bachelet (2006), Brazil dibawah Luiz Ignacio Lula da Silva (2003) yang dilanjutkan oleh Dilma Rousseff (2011), Nerston Kircher (2003) yang memimpin Argentina diteruskan ke masa pemerintahan Christian Fernandez (2007), Tabare Vasquez (2004) memimpin Uruguay, Bolivia yang dipimpin oleh Evo Morales (2005), Ekuador dibawah Rafael Correa (2006), Nicaragua dibawah Daniel Ortega (2006), Peru dibawah kepemimpinan Ollanta Humala (2006), Paraguay dikomandoi oleh Fernando Lugo (2008) serta tak lupa El Salvador dibawah pemerintahan Mauricio Funes (2009) (Subono, 2017).

Pergerakan yang dilakukan oleh para pemimpin kiri Amerika Latin tersebut untuk keluar dari dominasi Amerika Serikat cukup beragam. Dimulai dengan menasionalisasi aset-aset negara yang telah banyak dieksploitasi oleh pihak asing. Venezuela misalnya, melakukan nasionalisasi terhadap *Petroleos de Venezuela, S.A (PDVSA)* yang telah lama didominasi oleh Amerika Serikat serta Bolivia yang menaikkan royalti terhadap aset gas alamnya (Subono, 2017). Selain itu Evo Morales juga bersikap tegas menolak intervensi Amerika Serikat dengan menolak perjanjian multilateral maupun regional, Diantaranya *Free Trade Area of The Americas (FTAA)* yang dinilai lebih banyak merugikan rakyat. Di sisi lain, Evo Morales menggalang persatuan ekonomi dengan Presiden Venezuela, Hugo Chaves dan pemimpin Kuba, Fidel Castro dengan membentuk perjanjian *Alternativa Bolivariana para los Puelos de Nuestra America (ALBA)* pada tanggal 29 April 2006 (Lesmana, 2007). Semangat dari beberapa negara ini terinspirasi dari Kuba yang dapat bertahan dan mengembangkan perekonomian serta menggratiskan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan mereka dibawah embargo ekonomi yang telah dilakukan Amerika Serikat terhadap negara Kuba. Selain itu, Brazil dibawah kepemimpinan Lula menjalin kerjasama dengan Cina sebagai pengganti kerjasama dengan negara Amerika Serikat. Pada Mei 2009, kedua negara menandatangani 13 perjanjian kerjasama di bidang energi sekaligus menjadikan Cina sebagai mitra dagang terbesar Brazil pada saat itu (Harnecker, 2015).

Corak dari pemerintahan kiri negara-negara Amerika Latin adalah penguatan terhadap program sosial guna mengentaskan permasalahan sosial di

masyarakat. Di Brazil misalnya, Presiden Lula merumuskan program *Bolsa Familia*¹ yang berhasil memangkas angka kemiskinan absolut dari 9,7 persen menjadi 4,3 persen, meningkatkan jumlah keturunan kulit hitam di universitas meningkat tiga kali lipat dan menurunkan tingkat pengangguran mencapai tingkat terendah dalam sejarah (Stevan, 2019). Selain itu kepedulian pada lingkungan dan hak-hak kaum marjinal seperti *indigenous people* di wilayah Amazon, ras kulit hitam, dan perempuan juga menjadi kebijakan utama para pemimpin-pemimpin kiri tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan perlindungan dan konservasi lingkungan terutama hutan Amazon menjadi kebijakan utama dalam pemerintahan Lula di Brazil untuk mengurangi dan menekan tingkat deforestasi hutan Amazon. Lebih lanjut, dalam kepemimpinan Lula dan Dilma, Brazil senantiasa membangun citranya sebagai garda terdepan dalam perlindungan hutan Amazon di dunia melalui kebijakan-kebijakannya (Casado & Londono, 2019).

Namun nyatanya, dominasi pemerintahan kiri di kawasan Amerika Latin nyatanya tidak mampu terus konsisten bertahan. Di berbagai negara Amerika Latin, kekuatan sayap kanan kembali mengorganisir diri untuk menggulung pencapaian sayap kiri (Ramli, 2019). Banyak faktor penyebab ketidakmampuan kelompok sayap kiri Amerika Latin dalam menjaga dominasinya di kawasan tersebut. Ketidakmampuan pengganti pemimpin kharismatik seperti Fidel

¹*Bolsa Familia* adalah program kesejahteraan sosial yang dilancarkan oleh pemerintah Brazil. Program ini memberikan bantuan keuangan untuk keluarga miskin; bila mereka punya anak, mereka harus memastikan bahwa anak mereka masuk sekolah dan divaksinasi. Program ini berupaya mengurangi kemiskinan dengan memberikan uang kas sebagai solusi jangka pendek dan menambah modal manusia diantara orang-orang miskin melalui transfer kas kondisional sebagai solusi jangka panjang. Program ini juga menggratiskan pendidikan untuk anak-anak yang tidak mampu untuk menunjukkan pentingnya pendidikan

Castro di Kuba dan Hugo Chavez di Venezuela atau Lula di Brazil dalam mengurus negaranya serta beberapa kebijakan maupun tindakan-tindakan pemimpin-pemimpin kiri Amerika Latin yang malah bertolak belakang dengan semangat yang mereka usung selama ini, seringkali malah membuat rakyat mereka menggugat kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin kiri Amerika Latin tersebut. Kemunduran politik kiri Amerika Latin juga disebabkan oleh melemahnya komitmen pada kerja-kerja pengorganisasian dan edukasi rakyat.

James Petras dalam tulisannya, *is Latin America really turning left?* Memaparkan kritiknya kepada pemimpin negara-negara America Latin yang mendapat kategori kiri (Subono, 2017). Menurutnya, semua pemimpin tersebut baik sebagian atau seluruhnya, masih saja tetap mengakomodasi kebijakan ekonomi neoliberal yang mereka lawan. Dilma Rousseff, Presiden Brazil pada saat itu misalnya, dikritik karena dalam banyak kebijakannya ternyata lebih hirau kepada para pengusaha agrobisnis besar ketimbang para petani tak bertanah yang merupakan pendukung utamanya selama ini. Di sisi lain, James Petras juga mengklarifikasi watak nasionalis yang diadopsi oleh Chavez (Venezuela) dan Morales (Bolivia). Kedua Presiden tersebut, tidak benar-benar menghapuskan banyak elemen yang sangat penting dari produksi kapitalis seperti keuntungan privat, kepemilikan asing, akses pasar atau penyediaan energi atau barang-barang utama lainnya. Pada kenyataannya, mereka berdua hanya memperbaiki hubungan negara dan kalangan industriawan agar sesuai dengan ukuran-ukuran standar dunia saat itu. Sementara dukungan gerakan sosial yang menjadi fondasi atau basis sosial pemerintahan kiri Amerika Latin di banyak negara justru semakin

ditinggalkan. Padahal justru gerakan sosial ini merupakan inti dari kiri Amerika Latin yang sesungguhnya (Subono, 2017).

Pada akhirnya, arah angin politik Amerika Latin kembali berubah. Pemerintahan kiri mulai berguguran. Beberapa tokoh kiri berpengaruh digugat rakyatnya. Diawali dengan kekalahan partai kiri Chili pada 2010, disusul kekalahan mereka di Paraguay pada 2013 dan di Argentina pada 2015. Satu tahun berikutnya, kubu kiri kalah di Peru. Di tahun itu juga, rekan mereka, Presiden Brazil, Dilma Rousseff, dimakzulkan parlemen akibat isu korupsi dan krisis ekonomi (Ramli, 2019). Pukulan serius juga dialami Evo Morales, Presiden kharismatik dari kubu politik kiri Bolivia. Ekonom radikal dan Presiden Ekuador, Rafael Correa, dipaksa meletakkan jabatannya akibat gagal mengatasi resesi ekonomi. Pemerintahan Maduro di Venezuela pun digoyang tanpa ampun sejak kubu oposisi memenangkan pemilu legislatif pada tahun 2015 (Ramli, 2019).

Di Brazil, kekecewaan terhadap pemerintahan kiri menguat ketika krisis harga komoditas global tahun 2015 melanda seluruh kawasan khususnya Brazil. Kelas-kelas menengah yang sebelumnya menikmati hak-hak dari kebijakan ekonomi yang diusung Dilma Rousseff malah berbalik memprotes kebijakannya (Lavinias & Goncalves, 2019). Krisis tersebut, memunculkan klaim-klaim otoriter dan penolakan dari kaum *paneleiros* (kaum pendemo yang memukul-mukul panci) di Brazil yang memainkan peran penting dalam munculnya gelombang protes besar dan runtuhnya dukungan terhadap Dilma Rousseff serta bangkitnya gerakan populisme kanan Brazil. Pada tahun 2015-

2016, protes meluas ke seluruh kota besar di Brazil dengan tuntutan untuk menurunkan Dilma Rousseff maupun dominasi partai pekerja serta kebijakan-kebijakan sosial yang diperkenalkan sejak 2002. Beberapa kelompok terang-terangan meminta intervensi negara. Gerakan-gerakan anti-kiri lahir kembali dengan topeng *antichavismo* (menentang ideologi sayap kiri Chaves). Para pendukung anti-kiri tersebut juga menolak perbaikan ketimpangan sosial dan gender, yang terwujud dalam kebencian terhadap orang miskin, gay, feminis, kulit hitam dan kaum masyarakat adat yang kesemuanya dinilai tidak kompeten, bodoh dan gampang dibeli (Blanco & Berti, 2019).

Hasil dari kebangkitan politik sayap kanan baik secara politik praktis maupun dalam gerakan masyarakat di Brazil ditandai dengan kemenangan Jair Messias Bolsonaro pada pemilihan umum 2018 lalu. Sebagai seorang pensiunan tentara dan anggota dari partai sosial liberal, Bolsonaro mampu memenangkan pemilihan dengan total suara pemilih sebanyak 55,1%(Vivanco, 2018). Bolsonaro yang berhasil memenangkan pemilihan dengan mengendarai rasa frustrasi masyarakat Brazil terhadap kepemimpinan sayap kiri menjanjikan perubahan dramatis di Brazil. Beberapa janji politik Bolsonaro menasar pada pengelolaan hutan hujan Amazon(Sims, 2019) yang merupakan hutan hujan tropis terbesar di dunia.

Transisi pemerintahan dengan corak yang berbeda 180 derajat tentunya berimplikasi terhadap perubahan kebijakan baik dalam skala domestik maupun internasional, khususnya dalam sektor ekonomi dan politik. Perubahan tersebut juga menasar terhadap transformasi radikal pengelolaan hutan hujan Amazon

yang memiliki sumbangsih besar bagi roda ekonomi, budaya dan sosial Brazil. Perubahan kebijakan terhadap pengelolaan hutan Amazon tentunya berdampak sangat signifikan terhadap hutan Amazon itu sendiri, dan seluruh makhluk hidup yang bergantung hidup pada hutan Amazon. Belum lagi hutan Amazon yang memiliki nilai strategis dalam kebijakan ekonomi politik domestik dan internasional Brazil akan turut berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bolsonaro. Dan tentu saja, transformasi kebijakan Bolsonaro dalam pengelolaan terhadap hutan Amazon turut juga berdampak pada investor asing dan perusahaan global yang selama ini memiliki kepentingan di hutan Amazon. Oleh karena kompleksitas aktor dan dampak dari perubahan kebijakan ekonomi politik Brazil di hutan Amazon ini, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis bagaimana transformasi kebijakan ekonomi politik Brazil di bawah pemerintahan Bolsonaro terhadap pengelolaan hutan hujan Amazon bagi investor asing di Brazil.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penulisan skripsi ini akan berfokus pada analisis transformasi kebijakan ekonomi politik Brazil dan dampaknya terhadap pengelolaan hutan Amazon di bawah pemerintahan Bolsonaro. Maka daripada itu, penulis menentukan rumusan masalah skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk transformasi kebijakan ekonomi politik Brazil di bawah pemerintahan Bolsonaro terhadap pengelolaan hutan Amazon bagi investor asing di Brazil?

2. Apa saja implikasi dari transformasi kebijakan ekonomi politik Brazil di bawah pemerintahan Bolsonaro terhadap pengelolaan hutan Amazon bagi investor asing di Brazil?

Batasan pada penulisan skripsi ini mengacu pada laku pengambilan keputusan Jair Messias Bolsonaro sebagai Presiden Brazil saat ini dalam kebijakannya terhadap hutan hujan Amazon yang secara strategis memiliki peran vital dalam ekonomi politik dalam dan luar negeri Brazil. Oleh karena itu penulis akan memfokuskan analisis pengambilan keputusan Bolsonaro dalam variabel idiosinkratiknya. Selanjutnya, penulis memfokuskan pada bentuk-bentuk kebijakan ekonomi politik Brazil di bawah pemerintahan Bolsonaro terhadap pemanfaatan hutan Amazon baik dalam lingkup domestik maupun global. Bentuk kebijakan tersebut akan ditelaah dalam ruang lingkup hutan Amazon sebagai bagian dari kebijakan Bolsonaro terkait isu lingkungan, *indigenous people* hutan Amazon yang merupakan bagian tidak terpisahkan di dalamnya, serta hutan Amazon sebagai ruang strategis bagi penguatan ekonomi politik Brazil di kancah internasional. Terjadinya transformasi kebijakan tersebut tentu dibarengi dengan implikasi-implikasi yang merupakan *output* dari pilihan kebijakan tersebut. Maka dari itu, penulis juga akan membahas mengenai implikasi tersebut.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk transformasi kebijakan ekonomi politik Brazil di bawah pemerintahan Jair Bolsonaro terhadap pengelolaan hutan Amazon bagi investor asing di Brazil.
- b. Untuk mengetahui implikasi dari transformasi kebijakan ekonomi politik Brazil di bawah pemerintahan Jair Bolsonaro terhadap pengelolaan hutan Amazon bagi investor asing di Brazil.

2. Manfaat Penulisan

Manfaat Penulisan ini adalah:

- a. Penulisan ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi lebih mendalam mengenai transformasi kebijakan ekonomi politik Brazil dalam kasus hutan Amazon di bawah pemerintahan Bolsonaro dan apa saja implikasi dari perubahan kebijakan tersebut.
- b. Penulisan ini diharapkan menjadi salah satu bahan referensi bagi pelajar studi ilmu hubungan internasional dalam hal kajian mengenai dinamika ekonomi politik Brazil khususnya kebijakan Brazil pada masa pemerintahan Bolsonaro dalam kasus hutan Amazon.

D. Kerangka Konseptual

Adapun konsep dan teori yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. *Accumulation By Dispossession* David Harvey

Accumulation by Dispossession merupakan reformulasi David Havey atas konsep Akumulasi Primitif Karl Marx dan teori *Underconsumption* Rosa Luxemburg dalam karyanya berjudul *Accumulation Capital* (Rachman, 2011).

David Harvey mengemukakan istilah *Accumulation by Dispossession* (Akumulasi dengan cara perampasan) yang dibedakan dengan *Accumulation by Exploitation*, yakni akumulasi modal secara meluas melalui eksploitasi tenaga kerja dalam proses produksi dan sirkulasi barang dagangan.

Accumulation by Dispossession adalah konsep yang mendefinisikan kebijakan yang menghasilkan sentralisasi kekuasaan dan kekayaan di tangan segelintir orang dengan cara merampas kekayaan atau tanah mereka dari entitas publik dan swasta. Dalam proses akumulasi dengan cara perampasan ini, ia menekankan pentingnya produksi ruang, organisasi pembagian kerja yang secara keseluruhannya baru dalam wilayah yang baru pula, pembukaan berbagai macam cara perolehan sumber daya baru yang jauh lebih murah, pembukaan wilayah-wilayah baru sebagai bagian dari dinamika ruang-ruang akumulasi modal dan penetrasi terhadap formasi sosial yang ada oleh hubungan-hubungan sosial kapitalis dan tatanan kelembagaannya, (contoh, aturan kontrak dan kepemilikan pribadi), serta membuka jalan bagi penyerapan surplus modal maupun tenaga kerja (Rachman, 2011) .

Menurut Harvey (Rachman, 2011), *Accumulation by Dispossession* menjelaskan pelepasan serangkaian aset (termasuk tenaga kerja) dengan biaya yang sangat rendah (dan dalam banyak hal tanpa biaya). Modal yang telah terakumulasi secara berlebihan dapat dipakai untuk merampas rangkaian aset tersebut dan segera memasukkannya ke dalam suatu usaha baru pelipatgandaan keuntungan. Dalam karyanya *The New Imperialism*, Harvey menunjukkan bagaimana aset-aset yang dipegang oleh negara atau dikelola secara bersama

oleh penduduk, dilepaskan melalui pelepasan hak secara paksa atau sukarela ke pasar. Reorganisasi dan rekonstruksi geografis sebagai akibat dari pembukaan ruang baru bagi kapitalisme ini sering menjadi ancaman bagi keberlanjutan hidup, nilai-nilai, dan segala unsur kebudayaan yang memelihara keberadaan nilai-nilai yang telah menancap dalam dan terikat secara sosial pada tempat-tempat tersebut (Harvey, 2003).

Penulis mengangkat konsep ini karena dalam penulisan skripsi ini, penulis merasa perlu menghadirkan konsep atau teori ekonomi politik yang menjelaskan perubahan fungsi suatu ruang (dalam hal ini hutan Amazon) akibat kegiatan atau kebijakan ekonomi politik di ruang tersebut. Perbedaan ideologi ekonomi politik Bolsonaro dan pendahulunya tentu saja menjadi landasan dari pernyataan diatas. Bolsonaro yang berideologi kanan, memandang hutan Amazon sebagai ruang yang hadir dan dimiliki Brazil, untuk dieksploitasi dan dimanfaatkan sumber dayanya demi penguatan ekonomi negara. Hal ini tentu saja berdampak pada perubahan fungsi dan kebijakan pemerintah Brazil terhadap hutan amazon dan wilayah yg dihuni oleh *indigenous people* Brazil. Maka dari itu, konsep *Accumulation by Dispossession* ini, penulis nilai tepat untuk dijadikan sebagai alat analisis. Dalam penggunaan konsep ini, penulis akan banyak menggunakannya untuk melihat proses terjadinya pelepasan ruang, swastanisasi/privatisasi ruang, dan komodifikasi ruang publik wilayah hutan Amazon yang diakibatkan oleh berbagai bentuk transformasi kebijakan ekonomi politik Bolsonaro dalam wilayah hutan Amazon bagi investasi asing.

2. Variabel Idiosinkratik dalam Pengambilan Keputusan

Berbicara mengenai perumusan kebijakan, maka sudah pasti kita akan melihat dan menganalisis bagaimana kebijakan itu dibuat. Dalam ilmu Hubungan Internasional, konsep ini dikenal dengan *Decision Making*. Konsep pengambilan keputusan atau *decision making* ini merupakan konsep mengenai proses pembuatan keputusan yang turut dipengaruhi oleh kognisi (intelektual) dan psychodinamis (pengaruh dari interaksi yang terjadi antar aktor, dominan, determinan, pasif) (George, 2008).

Dalam *The Study of World Politics: Theoretical and Methodological Challenges* (Rosenau, 2006, pp. 169-246), James N. Rosenau memberikan sebuah pedoman yang dirancang untuk menelaah variabel-variabel yang mempengaruhi pembuatan kebijakan dalam politik luar negeri. Rosenau mengelompokkan variabel-variabel tersebut menjadi 4 kategori:

1. Variabel Idiosinkratik.

Variabel ini berhubungan dengan persepsi, image, dan karakteristik pribadi si pembuat keputusan. Karakteristik psikologis dan predeliksi (kegemaran) para pemimpin terhadap ideologi serta pembuat dan pelaksana politik tertentu terhadap hasil politik.

2. Variabel Birokratis.

Variabel ini terkait dengan struktur dan proses pemerintahan serta efeknya terhadap politik luar negeri. Pembuat kebijakan mengambil

keputusan-keputusan dengan dipengaruhi oleh nilai-nilai organisasi atau birokrasi dimana ia terlibat di dalamnya. Unit-unit birokrasi dalam suatu negara secara konstan bersaing untuk melestarikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan birokrasi tersebut serta memaksimalkan keterlibatan dan pengaruhnya dalam proses pembuatan keputusan.

3. Variabel Nasional.

Kategori ini terlingkupi oleh atribut-atribut nasional yang mempengaruhi hasil politik luar negeri dalam pembuatan kebijakan. Hal ini ditandai oleh adanya unsur-unsur kekuasaan (*power*) yang nyata (*tangible*) dan yang tidak nyata (*Intangible*).

4. Variabel Sistematis.

Dalam kategori ini kita bisa memasukkan seluruh struktur dan proses internasional. Para teoritis hubungan internasional tradisional dan yang berorientasi *scientific* berasumsi bahwa politik luar negeri adalah sekumpulan respon atau tanggapan terhadap tantangan-tantangan dan kesempatan eksternal.

Dalam penulisan ini, penulis akan banyak menggunakan pendekatan Idiosinkratik dalam melihat dan menganalisis bagaimana kebijakan dan program yang dikeluarkan oleh Bolsonaro terhadap hutan hujan Amazon.

Seperti dijelaskan diatas, variabel idiosinkratik sendiri berkenaan dengan persepsi, image, dan karakteristik pribadi si pembuat kebijakan. Kondisi-kondisi tersebut sangat mempengaruhi karakteristik psikologi terutama para pemimpin. Pengalaman semasa kecil hingga dewasa, pengaruh lingkungan hidup, ataupun

keluarga secara tidak langsung membentuk karakteristik kepribadian si individu dan akhirnya mempengaruhi si individu dalam mengambil keputusan. pembuat kebijakan suatu negara berkaitan dengan karakteristik pribadi para pemimpin politik yang membawa pengaruh besar. Pemimpin politik dapat mempengaruhi pemerintah mereka menuju agresif atau menuju hubungan damai dengan negara lain (Hermann, 1990).

Sementara itu dalam pandangan Russel Bova melalui karyanya *How The World Works: A Brief Survey of International Relations* (Bova, 2012), faktor-faktor individu yang dapat mempengaruhi politik luar negeri diklasifikasikan dalam dua variabel utama, yaitu sistem keyakinan (*belief system*) dan atribut kepribadian (*personality attributes*). Sebuah sistem keyakinan merujuk pada seperangkat nilai-nilai dan pemahaman substantif mengenai dunia yang dianut oleh seorang individu. Jika kita meyakini bahwa kualitas pemimpin mempunyai pengaruh pada politik luar negeri suatu negara, kita akan langsung mengacu padagagasan dan keyakinan substantif mereka mengenai dunia. Dalam konteks ini, perbedaan dalam sistem keyakinan dapat terwujud dalam perbedaan posisi ketika menanggapi tantangan kebijakan luar negeri tertentu. Sistem keyakinan yang tingkatnya paling rumit dan sangat terintegrasi adalah ideologi. Dalam hal ini, ideologi adalah seperangkat asumsi dan pemahaman yang terintegrasi mengenai bagaimana dunia sosial, ekonomi, politik seharusnya dikelola, distrukturisasi, atau diorganisasi. Seorang pemimpin yang berideologi nasionalis misalnya, akan memiliki pemahaman yang sangat berbeda mengenai dunia daripada seorang pemimpin yang berorientasi liberal. Perbedaan ideologis

ini pada gilirannya akan mempengaruhi pandangan negara (*state view*) mengenai siapa yang dianggap teman dan musuh di dunia, sifat dari tantangan dan ancaman yang dihadapinya, serta instrumen yang dapat digunakan untuk menghadapi tantangan dan ancaman tersebut (Bova, 2012). Dalam hal ini, penulis akan menggunakan variabel ideosinkratik dalam pengambilan keputusan sebagai alat analisis untuk memahami pilihan kebijakan yang dikeluarkan Bolsonaro berdasarkan latar belakang politik dan ideologi yang dianut olehnya.

Pilihan penulis untuk menjadikan konsep *Accumulation by Dispossession* David Harvey dan Variabel Idiosinkratik dalam pengambilan keputusan sebagai alat analisis utama dalam penelitian ini dikarenakan kedua konsep tersebut sesuai untuk menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. Variabel Idiosinkratik digunakan untuk menganalisis latar belakang pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan Bolsonaro baik dari latar belakang politik, lingkungannya, pendidikannya, partai politiknya dan segala macam variabel-variabel lainnya yang turut mempengaruhi pengambilan kebijakannya dalam perubahan kebijakan ekonomi politik Brazil terhadap hutan Amazon. *Accumulation by Dispossession* hadir untuk menganalisa bagaimana implikasi dari transformasi kebijakan Bolsonaro terhadap hutan Amazon dalam bidang ekonomi politik. Hal apa saja yang dalam bidang ekonomi politik internal dan luar negeri yang terpengaruh dengan perubahan kebijakan-kebijakan Bolsonaro di wilayah hutan Amazon akan dianalisis menggunakan konsep David Harvey tersebut. Sehingga penggunaan kedua konsep ini saling berkaitan dan memiliki

korelasi dan keterkaitan dalam penggunaannya untuk menjadi alat analisis dalam penelitian ini.

E. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis melihat pentingnya data-data dan juga analisis yang dapat menunjang tulisan ini guna menjawab bagaimana transformasi kebijakan ekonomi politik Brazil di bawah pemerintahan Jair Bolsonaro terhadap pengelolaan hutan Amazon bagi investor asing di Brazil. Maka pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap kata-kata, studi literatur, serta nantinya data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis untuk kemudian ditarik kesimpulan.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik penelitian pustaka. Disini penulis akan melihat dan menelusuri serta mempelajari berbagai dokumen, jurnal, buku, berita, dan laporan yang memiliki hubungan dengan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis.

c. Teknik Analisis Data

Penulis akan menggunakan teknik analisis data melalui hasil penelitian menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan menekankan analisis pada sebuah proses pengambilan kesimpulan baik secara induktif dan deduktif

serta melakukan analisis pada fenomena yang sedang diamati menggunakan metode ilmiah.

d. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan ialah metode deduktif, yaitu dengan menggambarkan secara umum masalah yang akan diteliti, kemudian peneliti akan menggambarkan permasalahan secara rinci lalu membuat suatu kesimpulan dari data-data yang didapat dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Accumulation by Dispossession* David Harvey

Menjelaskan konsep *Accumulation by Dispossession* David Harvey tidak akan bisa dilepaskan tanpa memahami konsep *Primitive Accumulation* Karl Marx terlebih dahulu. Hal tersebut mengingat *Accumulation by Dispossession* merupakan reformulasi David Harvey atas konsep Akumulasi primitif Karl Marx dan hasil analisis Rosa Luxemburg mengenai akumulasi kapital dalam karyanya berjudul *Accumulation Capital* (Rachman, 2011). Menurut Marx, akumulasi primitif adalah teori yang berupaya untuk mengungkap asal usul corak produksi kapitalisme. Pada awalnya akumulasi primitif merupakan penjelasan sekaligus kritik Marx terhadap pemikiran Adam Smith mengenai akumulasi kapital yang dinilai Marx ahistoris. Smith menyatakan bahwa pasar kapitalis digerakkan oleh *invisible hand* yang adil, dan karena itu ia akan menciptakan kesejahteraan bagi semua peserta yang terlibat di dalam pasar (Rachman, 2011). Tapi bagi Marx, pasar kapitalis tidak pernah bersifat adil dan netral, sebab pasar kapitalis berlangsung dalam kondisi penuh pemaksaan, penindasan dan eksploitasi akut.

Relasi sosial di bawah sistem kapitalisme bagi Marx dicirikan dengan terlepasnya massa rakyat dari sarana produksi, dan dalam kondisi demikian, akumulasi primitif dapat berlangsung dengan baik. Marx menyatakan bahwa akumulasi primitif merupakan proses historikal penceraian produsen dari alat-alat produksi (Dhosa, 2017). Dikatakan primitif, lanjut Marx karena akumulasi

tersebut merupakan pra sejarah kapital dan dari cara produksi yang bersesuaian dengan kapital. Di dalam gerak historis tersebut para produsen diubah menjadi pekerja upahan sesudah basis produksinya dirampok. Perampasan terhadap tanah-tanah milik petani, pengusiran dan penyerobotan atas tanah-tanah umum, menjadi tanah milik pribadi merupakan prasyarat penting untuk mengeluarkan massa rakyat dari basis produksi, yang memungkinkan mereka menjadi tenaga kerja merdeka dalam produksi kapitalis. Hal ini didukung oleh penertiban undang-undang sebagai legalisasi dalam pengambil alihan alat produksi masyarakat (Dhosa, 2017).

Menurut Harvey, penjelasan Marx mengenai masyarakat tersebut perlu disempurnakan karena terlalu aneh menyebut suatu praktek yang sesungguhnya terus berlangsung bersifat primitif atau awal. David Harvey dalam karyanya *The New Imperialism* (Harvey, 2003) menawarkan suatu refleksi kritis dan tawaran analitik dalam melihat dinamika kapital kontemporer yang disebut sebagai *Accumulation by Dispossession* (Akumulasi melalui Penjarahan). David Harvey menyebut frase *Accumulation by Dispossession* sebagai perluasan praktek *Primitive Accumulation* yang disebutkan Marx, yang meliputi praktek penjarahan secara kolonial, privatisasi, dan komodifikasi atas tanah. *Accumulation by Dispossession* adalah konsep yang mendefinisikan kebijakan yang menghasilkan sentralisasi kekuasaan dan kekayaan di tangan segelintir orang dengan cara merampas kekayaan atau tanah dari entitas publik dan swasta. Dalam proses akumulasi dengan cara perampasan ia menekankan pentingnya produksi ruang, organisasi pembagian kerja yang secara

keseluruhannya baru dalam wilayah yang baru pula, pembukaan berbagai macam cara perolehan sumber daya baru yang jauh lebih murah, pembukaan wilayah-wilayah baru sebagai bagian dari dinamika ruang-ruang akumulasi modal dan penetrasi terhadap formasi sosial yang ada oleh hubungan-hubungan sosial kapitalis dan tatanan kelembagaannya (contoh, aturan kontrak dan kepemilikan pribadi) yang membuka jalan bagi penyerapan surplus modal maupun tenaga kerja.

Menurut Harvey, *Accumulation by Dispossession* berguna untuk menjelaskan pelepasan serangkaian aset (termasuk tenaga kerja) dengan biaya yang sangat rendah (dan dalam banyak hal tanpa biaya). Modal yang telah terakumulasi secara berlebihan dapat dipakai untuk merampas rangkaian aset tersebut dan segera memasukkannya ke dalam suatu usaha baru pelipatgandaan keuntungan. Dalam karyanya *The New Imperialism*, Harvey menunjukkan bagaimana aset-aset yang dipegang oleh negara atau dikelola secara bersama oleh penduduk dilepaskan melalui pelepasan hak secara paksa atau sukarela ke pasar. Reorganisasi dan rekonstruksi geografis sebagai akibat dari pembukaan ruang baru bagi kapitalisme ini sering menjadi ancaman bagi keberlanjutan hidup nilai-nilai dan segala unsur kebudayaan yang memelihara keberadaan nilai-nilai yang telah menancap dalam dan terikat secara sosial pada tempat-tempat tersebut (Harvey, 2003).

Proses akumulasi melalui penjarahan menurut Harvey, bercirikan proses komodifikasi dan privatisasi tanah, pengusiran paksa petani, perubahan berbagai bentuk hak milik (hak milik bersama, hak milik kolektif, hak milik

negara, dsb) menjadi milik pribadi, penyangkalan keberadaan hak-hak atas milik bersama, komodifikasi tenaga kerja, dan penyangkalan terhadap bentuk bentuk produksi dan konsumsi alternatif (pribumi); proses-proses ekspropriasi secara kolonial, neokolonial dan imperial aset-aset (termasuk sumber daya alam); monetisasi pertukaran dan pajak, terutama pajak atas tanah, perdagangan budak, dan praktik riba, utang nasional, dan sistem kredit secara radikal dalam akumulasi primitif. Kekuatan monopoli negara atas kekerasan dan penetapan hukum memainkan peran krusial dalam mendukung dan memajukan proses tersebut dan dalam banyak hal sangat bergantung pada sikap negara. Peran pembangunan oleh negara menjadi penting, yakni untuk menjaga agar logika teritorial dan logika kapitalistik dari kekuasaan selalu jalin-menjalin, meski tidak harus selalu selaras. Sedangkan dalam tingkatan global, apa yang Harvey sebut sebagai *Accumulation by Dispossession*, dilakukan dengan pemaksaan kebijakan neoliberal, seperti: swastanisasi komodifikasi segala hal, finansialisasi perekonomian nasional, manajemen dan manipulasi krisis ekonomi dan redistribusi tak-sempurna oleh negara neoliberal yang menguntungkan kelas kapitalis global dan parasit-parasitnya di dunia ketiga.

Akumulasi lewat penjarahan juga dapat dipahami sebagai suatu biaya yang perlu untuk membuat suatu terobosan dalam pembangunan kapitalis oleh dukungan kuat oleh kekuatan negara-negara. Dalam karyanya, David Harvey menggambarkan hal tersebut dari pengalaman *Accumulation by Dispossession* yang diaplikasikan dalam bentuk utang yang dipaksakan oleh IMF, kepada negara peminjam, dengan tekanan *Structural Adjustment Program* atau Program

Penyesuaian Struktural (PPS). Program ini kemudiam menyeret anggotanya di hampir seluruh dunia untuk melakukan deregulasi, privatisasi, komodifikasi, dan liberalisasi terhadap aset-aset publik negara, serta memaksa negara-negara anggota untuk membuka seluas-luasnya terhadap keran investasi yang memungkinkan perusahaan mengeruk sebebaskan-bebasnya sumber daya alam milik negara tersebut.

David Harvey dalam karyanya menyimpulkan empat fitur utama *Accumulation by Dispossession* yang dilakukan secara terstruktur (Harvey, 2003), yaitu:

1. Privatisasi dan Komodifikasi

Komodifikasi dan Privatisasi terhadap aset-aset publik merupakan suatu fitur khas dari praktek neoliberal. Tujuan utamanya adalah untuk membuka medan-medan baru bagi akumulasi kapital dalam domain-domain yang selama ini terbatas aksesnya bagi pencaharian laba, seperti sarana dan prasarana fisik milik kolektif (air, telekomunikasi, transportasi), tunjangan kesejahteraan sosial (perumahan sosial, pendidikan, pelayanan, kesehatan, dan pensiunan serta asuransi jiwa), dan institusi publik (universitas, laboratorium riset kesehatan, pertanian maupun budidaya perikanan) yang semuanya diprivatisasikan dengan tingkatan masing-masing. Seringkali kekuatan negara digunakan untuk memaksakan berlangsungnya proses tersebut, bahkan meski proses tersebut bertentangan dengan kepentingan umum.

2. Finansialisasi atau liberalisasi keuangan

Deregulasi membuat sistem keuangan menjadi salah satu pusat utama dari aktifitas redistribusi dalam bentuk aktivitas spekulasi pencaplokan perusahaan yang lebih lemah, serta perilaku curang dan pembobolan keuangan. Aktifitas investasi yang curang dimana terjadinya penghancuran nilai aset secara terencana melalui inflasi, penjualan aspek yang murah dibawah harga pasar melalui merger dan akusisi, dinaikkannya tingkat suku bunga utang, sampai dengan kecurangan korporasi dengan penjarahan aset-aset melalui manipulasi-manipulasi kredit dan saham menjadi fitur utama dari sistem keuangan kapitalistik.

3. Manajemen dan Manipulasi Krisis

Di luar aktifitas spekulasi yang seringkali berlangsung penuh dengan kecurangan dan merupakan ciri utama dari banyak manipulasi neoliberal, berlangsung suatu proses lebih dalam yang mendorong munculnya perangkap utang sebagai suatu cara utama untuk melakukan akumulasi melalui penjarahan. penciptaan, pengelolaan, dan pemanipulasian krisis keuangan di level dunia telah menjadi seni tingkat tinggi agen-agen utama neoliberal dalam praktek redistribusi kekayaan negara-negara berkembang dan negara-negara miskin ke negara kaya. Banyak contoh negara-negara berkembang yang tersentuh oleh taktik akumulasi lewat penjarahan melalui instrumen manipulasi utang. Indonesia adalah salah satu contoh negara yang terjebak

manipulasi utang yang berbuntut pada krisis keuangan. Dimana krisis keuangan tersebut dikontrol dan dikelola dengan baik untuk merasionalisasikan sistem ekonomi maupun mendistribusikan aset-aset negara tersebut.

4. Retribusi oleh Negara

Begitu suatu negara berhasil dineoliberalisasikan, maka negara tersebut akan menjadi agen primer dari kebijakan-kebijakna retribusi kekayaan ke kantong-kantong elite. Proses retribusi ini pertama-tama melalui aktivitas privatisasi dan pemangkasan-pemangkasan pengeluaran negara untuk biaya-biaya sosial. Negara neoliberal juga melakukan retribusi kekayaan dan pendapatan melalui revisi-revisi atas peraturan fiskal dan pajak. Revisi-revisi itu dilakukan hanya untuk menguntungkan tingkat kembalian atas investasi. Selain itu revisi-revisi itu juga dilakukan untuk memajukan elemen-elemen regresif dalam peraturan pajak atas komodifikasi aset-aset publik maupun aset-aset strategis.

B. Variabel Idiosinkratik dalam Pengambilan Keputusan

Konsep *Decision making* (pengambilan keputusan), muncul pada 1950-an di Amerika Serikat. Salah satu penyumbang gagasan tentang pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan luar negeri adalah Richard C. Snyder tahun 1954 melalui bukunya *Foreign Policy Decision-Making* (Snyder, 2002). Menurut Snyder, *Decision Making* atau pengambilan keputusan adalah inti dari perilaku organisasi/kelembagaan, yang turut melibatkan kompetensi dari aktor pengambil keputusan, komunikasi, jalannya informasi dan motif dari berbagai pemeran di

sekitar pengambil keputusan. Snyder menerangkan bahwa *decision making* memiliki struktur dan ruang lingkup pada sistem domestik (internal) dan sistem internasional (eksternal) yang harus dipertimbangkan oleh negara. Faktor interaksi internal dan eksternal akan menuntun negara pada pembuatan kebijakan. Faktor internal lebih menekankan pada hubungan masyarakat dengan negara, sedangkan faktor eksternal lebih menekankan struktur internasional seperti hubungan dengan negara lain serta situasi dunia (Snyder, 2002). Snyder menjadi yang pertama dalam menyederhanakan level analisis untuk mempelajari perilaku negara dalam arena internasional; eksternal dan internal, yakni memahami perilaku negara dalam arena politik internasional serta memahami proses pertarungan kepentingan dalam negeri. Apa yang dilakukan oleh Snyder menjadi berpengaruh terhadap makin beragamnya kajian teori pengambilan keputusan dalam politik internasional seperti gagasan beberapa tokoh seperti William Coplin, James N. Rosenau dan L. Andi Afnotan.

William Coplin dalam bukunya *Introduction to International Politics: A Theoretical Overview* (Coplin, 1971), melihat bahwa politik luar negeri yang dilakukan oleh sebuah negara merupakan respon terhadap apa yang dilakukan oleh negara lain. Pendekatan ini mencoba menganalisis tiap respon apa saja yang akan dilakukan sebagai bentuk dari perhitungan yang rasional. Pendekatan ini disebut rasional karena akan menghitung atau menganalisis dari alternatif-alternatif yang ada, mana alternatif yang paling baik dan paling tidak baik untuk dijadikan tindakan respon dalam politik luar negeri.

Menurut Coplin, untuk dapat memahami mengapa suatu negara berperilaku sejalan dengan wilayah kepentingan mereka, kita harus memahami juga mengapa atau apa yang melatar belakangi para pemimpin mereka membuat keputusan. Namun, ini akan menjadi kesalahan jika kita menganggap bahwa para pembuat kebijakan luar negeri bertindak dalam suatu keadaan yang vacuum. Sebaliknya, setiap kebijakan luar negeri yang diberikan dapat dilihat sebagai hasil dari tiga kategori pertimbangan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara pengambil keputusan. Yang pertama adalah politik dalam negeri dalam kebijakan negara-negara pengambil keputusan. Yang kedua adalah kemampuan ekonomi dan militer negara. Yang ketiga adalah konteks internasional, posisi tertentu di mana negara itu menemukan jati dirinya, khususnya mengenai hubungannya dengan negara lain dalam suatu sistem (Coplin, 1971).

Pemikir lain yang menyumbangkan pemikirannya dalam teori pengambilan keputusan (*decision making*) adalah L. Andy Afinotan seorang ilmuan hubungan internasional dalam karyanya yang berjudul *Decision Making in International Relations: A Theoretical Analysis* (Afinotan, 2014) yang diterbitkan pada tahun 2014. Menurut Afinotan, pengambilan keputusan tidak lain didasarkan pada kemampuan si pengambil keputusan untuk mengidentifikasi untung-rugi dari keputusan yang diambil (*cost and benefit analysis*), serta memaksimalkan pilihan-pilihan keputusan yang dihadapi oleh si pengambil keputusan. Pengambilan keputusan dalam atmosfer yang demokratis turut

dipengaruhi oleh proses dialektika/interaksi antar pengambil keputusan (baik secara materil maupun gagasan politik).

Negara ataupun sistem internasional sudah pasti menjadi arena bagi aktifitas pengambil keputusan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai kerangka pengambilan keputusan. Afinotan memetakan 4 elemen yang mempengaruhi kerangka pengambilan keputusan (Afinotan, 2014):

1. Situasi Keputusan (*Decision Situations*)

Elemen ini berkaitan dengan lingkungan yang secara esensial mempengaruhi pengambilan keputusan, baik internal maupun eksternal, atau keputusan harus diambil dalam situasi yang sedang krisis atau dibawah tekanan.

2. Partisipan Keputusan (*Decision Participants*)

Berkaitan dengan aktor utama dalam proses pengambilan keputusan, latar belakang pendidikan/politik, pengalaman, nilai dan kecenderungan, serta persepsi dan kapabilitas dari pejabat-pejabat yang dilibatkan oleh si pengambil keputusan dalam diskusi pengambilan keputusan.

3. Proses Keputusan (*Decision Process*)

Berkaitan dengan teknik serta strategis yang digunakan untuk mengambil keputusan. Serta menyangkut kualitas kompetensi yang dimiliki oleh partisipasi keputusan, informasi yang tersedia, serta motivasi/motif apa yang dimiliki oleh partisipasi keputusan.

4. Hasil Keputusan (*Decision Outcome*)

Berkaitan relevansi antara proses dan hasil (*net results*) serta totalitas hasil dari proses pengambilan keputusan termasuk dampak dan konsekuensi dari proses pengambilan keputusan.

Dalam *The Study of World Politics: Theoretical and Methodological Challenges* (Rosenau, 2006), James N. Rosenau memberikan sebuah pedoman yang dirancang untuk menelaah variabel-variabel yang mempengaruhi pembuatan kebijakan dalam politik luar negeri. Rosenau mengelompokkan variabel-variabel tersebut menjadi 4 kategori:

1. Variabel Idiosinkratik.

Variabel ini berhubungan dengan persepsi, image, karakteristik pribadi si pembuat keputusan, serta karakteristik psikologis dan predeliksi (kegemanan) para pemimpin terhadap ideologi serta pembuat dan pelaksana politik tertentu terhadap hasil politik.

2. Variabel Birokratis.

Variabel ini terkait dengan struktur dan proses pemerintahan serta efeknya terhadap politik luar negeri. Pembuat kebijakan mengambil keputusan-keputusan dengan dipengaruhi oleh nilai-nilai organisasi atau birokrasi dimana ia terlibat di dalamnya. Unit-unit birokrasi dalam suatu negara secara konstan bersaing untuk melestarikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan birokrasi tersebut serta memaksimalkan keterlibatan dan pengaruhnya dalam proses pembuatan keputusan.

3. Variabel Nasional.

Kategori ini terlingkupi oleh atribut-atribut nasional yang mempengaruhi hasil politik luar negeri dalam pembuatan kebijakan. Hal ini ditandai oleh adanya unsur-unsur kekuasaan (*power*) yang nyata (*tangible*) dan yang tidak nyata (*Intangible*).

4. Variabel Sistematis.

Dalam kategori ini kita bisa memasukkan seluruh struktur dan proses internasional. Para teoritis hubungan internasional tradisional dan yang berorientasi *scientific* berasumsi bahwa politik luar negeri adalah sekumpulan respon atau tanggapan terhadap tantangan-tantangan dan kesempatan eksternal.

Variabel Idiosinkratik yang merupakan salah satu variabel yang memiliki pengaruh dalam pembuatan kebijakan dalam dan luar negeri suatu negara akan banyak digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam memahami gerak-gerik negara Brazil dalam pembuatan kebijakan dalam kasus hutan amazon baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Variabel Idiosinkratik ini akan banyak bermain dalam ranah unit analisis individu. Sejalan dengan Rosenau, pandangan Kalevi J. Holsti juga menjelaskan bahwa variabel ini berpusat pada variabel ideologi, motivasi, cita-cita, persepsi, nilai-nilai, dan latar belakang individu si pembuat kebijakan (Holsti, 2016). Sementara Melania Gabriela membagi faktor idiosinkratik dalam pembuatan keputusan politik luar negeri menjadi empat jenis, yaitu: *cognitive idiosyncracies*, *social preception*

idiosyncracies, *motivational idiosyncracies*, dan *emotional (affective) idiosyncracies* (Bakri, 2016).

Cognitive Idiosyncracies diidentifikasi sebagai kategori-kategori seperti *framing*, *anchoring*, *disponibility*, utilitas, kerangka konseptual, persepsi tentang tugas (*task preception*), konsistensi kognitif, kompleksitas konseptual, kompleksitas integratif, gaya berbicara, *events presentation*, konstruksi yang mempengaruhi gaya putusan, citra, analogi historis, dan sebagainya. *Social preception idiosyncracies* diidentifikasi sebagai kategori-kategori yang berpusat pada *self* dan *others* yang ditunjukkan melalui fragmen-fragmen dalam berbagai wacana dan wawancara, seperti transparansi dan pendekatan prespektif (*self*) serta prioritas kepentingan dan memahami bagian pihak lain (*others*). Sementara *motivational idiosyncracies* ditunjukkan dalam beberapa kateogri seperti realisasi diri (*self-realization*), koherensi dan keseimbangan (*coherence and balance*), kerjasama, dan tanggung jawab. Sedangkan *emotional (affective) idiosyncracies* mencakup kategori emosi-emosi positif (apakah ia seorang periang, bergairah, penuh harapan, dan sebagainya) serta emosi-emosi negatif (orang yang penyedih, gampang merasa tidak nyaman, mudah marah, dan sebagainya) (Bakri, 2016).

Menurut John Rourke dan Mark Boyer dalam *International Politics on The World Stage* (Rourke & Boyer, 2007), analisis tingkat individu melibatkan pemahaman mengenai individu sebagai spesies, individu dalam kelompok, dan individu secara idiosinkratik. Dalam pendekatan individu sebagai spesies, pembuatan keputusan politik luar negeri dipengaruhi oleh faktor-faktor kognitif,

emosional, psikologis, persepsi, dan seringkali biologis (etologi dan gender). Dalam pendekatan individu dalam kelompok, dapat diilustrasikan dua konsep, yakni perilaku peran (*role behavior*), dan perilaku pengambilan keputusan dalam kelompok (*group decision-making behavior*). Sedangkan pendekatan idiosinkratik sedikitnya menelaah lima faktor, yakni faktor kepribadian, faktor kesehatan fisik, dan jiwa, faktor ego dan ambisi, faktor sejarah politik dan pengalaman pribadi, dan faktor persepsi dan realitas operasional (Rourke & Boyer, 2007).

Tabel 1.1
Faktor Individu Dalam Politik Luar Negeri

PENDEKATAN	VARIABEL
A. Individu sebagai sebuah spesies	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Cognitive factors</i> 2. <i>Emotional factors</i> 3. <i>Psychological factors</i> 4. <i>Perception factors</i> 5. <i>Biological factors</i>
B. Individu dalam kelompok	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Role Behavior</i> 2. <i>Group decision-making behavior</i>
C. Individu dalam konteks Indeosinkretik	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Personality factors</i> 2. <i>Physical and mental health</i> 3. <i>Ego and ambitious</i> 4. <i>Political history and personal experiences</i> 5. <i>Perceptions and operational reality</i>

Sumber: John T. Rourke dan Mark A. Boyer dalam *International Politics on The World Stage*, 2009

Sementara itu dalam pandangan Russel Bova melalui karyanya *How The World Works: A Brief Survey of International Relations* (Bova, 2012), faktor-faktor individu yang dapat mempengaruhi politik luar negeri diklasifikasikan dalam dua variabel utama, yaitu sistem keyakinan (*belief system*) dan atribut kepribadian (*personality attributes*). Sebuah sistem keyakinan merujuk pada seperangkat nilai-nilai dan pemahaman substantif mengenai dunia yang dianut

oleh seorang individu. Jika kita meyakini bahwa kualitas pemimpin mempunyai pengaruh pada politik luar negeri suatu negara, kita akan langsung mengacu pada gagasan dan keyakinan substantif mereka mengenai dunia. Dalam konteks ini, perbedaan dalam sistem keyakinan dapat terwujud dalam perbedaan posisi ketika menanggapi tantangan kebijakan luar negeri tertentu. Sistem keyakinan yang tingkatnya paling rumit dan sangat terintegrasi adalah ideologi. Dalam hal ini, ideologi adalah seperangkat asumsi dan pemahaman yang terintegrasi mengenai bagaimana dunia sosial, ekonomi, politik seharusnya dikelola, distrukturisasi, atau diorganisasi. Seorang pemimpin yang berideologi nasionalis misalnya, akan memiliki pemahaman yang sangat berbeda mengenai dunia daripada seorang pemimpin yang berorientasi liberal. Perbedaan ideologis ini pada gilirannya akan mempengaruhi pandangan negara (*state view*) mengenai siapa yang dianggap teman dan musuh di dunia, sifat dari tantangan dan ancaman yang dihadapinya, serta instrumen yang dapat digunakan untuk menghadapi tantangan dan ancaman tersebut (Bova, 2012).

Konsep *decision making* melalui pendekatan idiosinkratik akan sangat membantu dalam memahami pilihan-pilihan kebijakan dan program yang dikeluarkan oleh Jair Messias Bolsonaro terhadap hutan Amazon. Tentu saja program dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bolsonaro akan berbeda dengan Presiden pendahulunya yaitu Lula maupun Dilma. Komparasi kebijakan mereka akan sangat mungkin diteliti dengan menggunakan konsep *decision making* melalui pendekatan Idiosinkratik.